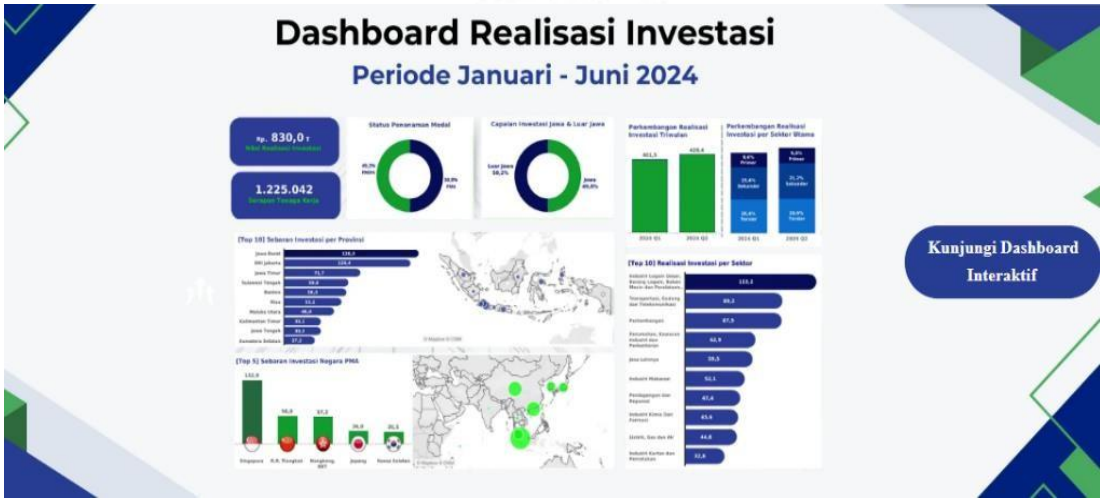
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi nasional tidak dapat dilepaskan dari peran investasi atau penanaman modal sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing daerah (Astuti, 2018). Dalam konteks globalisasi dan persaingan ekonomi yang semakin ketat, setiap daerah di Indonesia dituntut untuk mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan. Provinsi Jawa Barat, sebagai kontributor utama terhadap perekonomian nasional dan pintu gerbang ekonomi di bagian barat Indonesia, memiliki peran strategis. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi di Jawa Barat secara konsisten berada di posisi teratas secara nasional. Pada tahun 2023, realisasi investasi mencapai Rp 185,1 triliun, berkontribusi signifikan terhadap target nasional dengan sektor unggulan meliputi pengolahan, perdagangan, dan properti (DPMPTSP Jawa Barat, 2024). Pencapaian ini sekaligus menuntut pengelolaan dan pengawasan investasi yang kuat di tingkat daerah untuk memastikan keberlanjutan dan dampak positifnya bagi masyarakat (Arifin, 2007).



Gambar 1.1 Dashboard Realisasi Investasi
Sumber : Satu Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Kota Bandung merupakan salah satu wilayah dengan tingkat dinamika ekonomi yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Barat. Sebagai pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan industri kreatif, Kota Bandung memiliki daya tarik yang signifikan bagi investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Potensi tersebut menuntut adanya tata kelola investasi yang efektif agar kegiatan penanaman modal dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pembangunan daerah, peningkatan pendapatan masyarakat, serta perluasan kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung memegang peranan penting sebagai instansi pelaksana kebijakan penanaman modal di tingkat daerah (Icasya, 2018).

DPMPTSP Kota Bandung memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan, sekaligus melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan penanaman modal. Salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut ialah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). LKPM merupakan laporan yang wajib disampaikan secara berkala oleh pelaku usaha kepada pemerintah, sebagai bentuk tanggung jawab administratif serta sarana pemantauan perkembangan kegiatan investasi. Melalui LKPM pemerintah daerah dapat memperoleh data faktual mengenai realisasi investasi, kendala operasional yang dihadapi pelaku usaha serta langkah pembinaan yang perlu ditempuh guna memastikan kegiatan investasi berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan arah pembangunan daerah.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan pengawasan dan pembinaan penanaman modal melalui LKPM di Kota Bandung masih menghadapi berbagai persoalan. Berdasarkan data dan temuan empiris di lapangan tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM masih tergolong rendah. Sebagian besar pelaku usaha terutama pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, belum memahami sepenuhnya urgensi penyampaian LKPM sebagai bagian dari sistem pengawasan investasi. Selain itu, fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Bandung belum sepenuhnya optimal, antara lain disebabkan oleh keterbatasan sumber

daya manusia, sarana prasarana, serta belum terbangunnya koordinasi yang efektif dengan instansi teknis terkait. Kondisi tersebut berimplikasi pada belum maksimalnya proses pembinaan dan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan kegiatan penanaman modal. Permasalahan lain yang muncul ialah kendala teknis dalam penerapan sistem pelaporan digital melalui *Online Single Submission–Risk Based Approach* (OSS-RBA) (Tambun, 2009).

Perubahan mekanisme pelaporan dari manual ke sistem daring masih menimbulkan kesulitan bagi sejumlah pelaku usaha, terutama dalam hal pengoperasian sistem dan pemahaman prosedur (Septiani & Isnawaty, 2025). Di sisi lain, kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh DPMPTSP dinilai belum menjangkau seluruh pelaku usaha, sehingga tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan LKPM masih terbatas. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasinya (*gap implementation*), yang berdampak pada belum optimalnya efektivitas kebijakan pengawasan penanaman modal di tingkat daerah.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya pengawasan dan pembinaan penanaman modal dalam mendukung keberlanjutan investasi di Kota Bandung. Ketika mekanisme LKPM tidak dilaksanakan secara optimal, maka pemerintah daerah akan mengalami kesulitan dalam memperoleh data akurat terkait perkembangan investasi, hambatan pelaku usaha, serta efektivitas pembinaan yang telah dijalankan. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi kebijakan pengawasan dan pembinaan penanaman modal menjadi relevan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut dilaksanakan, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, serta merumuskan upaya perbaikan terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji implementasi kebijakan pengawasan dan pembinaan penanaman modal (LKPM) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung, dengan tujuan menganalisis proses pelaksanaannya, faktor pendukung dan penghambat, serta implikasinya terhadap efektivitas kebijakan penanaman modal di daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi penguatan

tata kelola investasi daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjuta, kerja yang aman dan mendukung perlindungan tenaga kerja secara berkelanjutan.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Investasi PMDN/PMA Kota Bandung Tahun 2022–2024

Tahun	Target Investasi	Realisasi Investasi	Capaian
2022	Rp6,650 triliun	Rp7,788 triliun	117%
2023	Rp7,120 triliun	Rp8,539 triliun	120%
2024	Rp7,300 triliun	Rp8,571 triliun	117%

Sumber: Diolah Peneliti, Renstra DPMPTSP Kota Bandung Tahun 2025–2029 (2026).

Perkembangan penanaman modal di Kota Bandung dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa aktivitas investasi memiliki nilai ekonomi yang cukup besar dan perlu diikuti dengan pengawasan serta pembinaan yang memadai. Berdasarkan Rencana Strategis DPMPTSP Kota Bandung Tahun 2025–2029, realisasi investasi Kota Bandung pada tahun 2022 mencapai Rp7,788 triliun dari target Rp6,650 triliun atau sebesar 117 persen. Pada tahun 2023, realisasi investasi meningkat menjadi Rp8,539 triliun dari target Rp7,120 triliun atau mencapai 120 persen. Sementara itu, pada tahun 2024 realisasi investasi mencapai Rp8,571 triliun dari target Rp7,300 triliun atau sebesar 117 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa realisasi investasi Kota Bandung selama periode 2022–2024 secara nominal telah melampaui target tahunan yang ditetapkan pemerintah daerah.

Meskipun demikian, tingginya realisasi nilai investasi tidak dapat secara langsung digunakan untuk menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengawasan dan pembinaan penanaman modal telah berjalan efektif. Nilai realisasi investasi merupakan indikator capaian aktivitas penanaman modal, sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana kebijakan pengawasan dan pembinaan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Bandung, khususnya melalui pemantauan dan pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Dengan demikian, data realisasi investasi dalam penelitian ini digunakan sebagai konteks yang menunjukkan besarnya aktivitas

penanaman modal yang perlu dikelola, diawasi, dan dibina, bukan sebagai ukuran tunggal keberhasilan implementasi kebijakan.

Kondisi tersebut menjadi semakin penting karena peningkatan aktivitas penanaman modal diikuti oleh meningkatnya jumlah pelaporan LKPM yang harus dikelola oleh pemerintah daerah. Data DPMPTSP Kota Bandung menunjukkan bahwa jumlah proyek atau kegiatan usaha yang melaporkan LKPM meningkat dari 1.468 proyek pada tahun 2020 menjadi 20.060 proyek pada tahun 2024. Pada periode yang sama, jumlah investor PMDN dan PMA yang melaporkan LKPM meningkat dari 721 investor menjadi 3.958 investor. Peningkatan jumlah pelapor tersebut menunjukkan semakin luasnya cakupan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang harus dilakukan oleh DPMPTSP Kota Bandung.

Dengan demikian, persoalan penelitian tidak terletak semata-mata pada kemampuan Kota Bandung mencapai target nilai investasi, tetapi pada kemampuan pemerintah daerah memastikan bahwa peningkatan aktivitas penanaman modal tersebut diikuti oleh implementasi pengawasan dan pembinaan yang mampu menjangkau pelaku usaha secara memadai. Pengawasan tidak hanya berkaitan dengan penerimaan laporan LKPM, tetapi juga mencakup pemeriksaan, pemantauan, pembinaan, pendampingan, serta tindak lanjut terhadap permasalahan yang dihadapi pelaku usaha. Dalam pelaksanaannya, DPMPTSP Kota Bandung menerima data LKPM melalui sistem OSS, melakukan verifikasi terhadap laporan, serta memberikan pembinaan atau tindak lanjut terhadap pelaku usaha sesuai dengan kondisi dan ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk menganalisis lebih lanjut implementasi kebijakan pengawasan dan pembinaan penanaman modal melalui LKPM pada DPMPTSP Kota Bandung. Analisis tersebut diarahkan pada empat dimensi implementasi kebijakan (Edward III, 1990), yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat dimensi tersebut digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana informasi kebijakan disampaikan kepada pelaku usaha, bagaimana kecukupan sumber daya mendukung pelaksanaan pengawasan dan pembinaan,

bagaimana komitmen serta respons pelaksana dalam menjalankan kebijakan, serta bagaimana struktur organisasi, prosedur, pembagian tugas, dan koordinasi mendukung pelaksanaan kebijakan di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis implementasi kebijakan pengawasan dan pembinaan penanaman modal (LKPM) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung, guna memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana kebijakan tersebut dijalankan serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

Secara keseluruhan, data tersebut memperlihatkan bahwa meskipun terjadi dinamika fluktuatif, arah kebijakan pengawasan dan pembinaan investasi oleh DPMPTSP Kota Bandung menunjukkan tren positif menuju pengelolaan penanaman modal yang lebih transparan, terukur, dan akuntabel. Namun, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan dan implementasi, terutama dalam optimalisasi pelaporan LKPM dan efektivitas koordinasi lintas sektor. Kondisi inilah yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian dengan judul "**Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung**"

B. Identifikasi Masalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Penelitian mengenai implementasi kebijakan pengawasan dan pembinaan penanaman modal pada DPMPTSP Kota Bandung ini dilakukan untuk menjawab beberapa permasalahan mendasar yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Rendahnya Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha: Meskipun diwajibkan secara hukum, tingkat penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) oleh pelaku usaha, khususnya dari sektor mikro, kecil, dan menengah (UMKM), di Kota Bandung masih tergolong rendah. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan tersebut, apakah disebabkan oleh ketidaktahuan, kerumitan prosedur, atau persepsi bahwa laporan ini tidak penting.

2. Belum Optimalnya Kapasitas Kelembagaan DPMPTSP: Fungsi pengawasan dan pembinaan oleh DPMPTSP Kota Bandung diduga belum berjalan optimal. Identifikasi masalah menyoroti kemungkinan keterbatasan pada aspek Sumber Daya Manusia (jumlah, kompetensi), Sarana Prasarana, serta Mekanisme Koordinasi dengan instansi teknis terkait. Hal ini mempertanyakan sejauh mana kapasitas kelembagaan memengaruhi efektivitas pengawasan.
3. Kesenjangan Digital (*Digital Gap*) dalam Implementasi Kebijakan: Peralihan sistem pelaporan ke platform digital (OSS-RBA) justru menciptakan kendala teknis bagi sebagian pelaku usaha. Masalah ini mengidentifikasi adanya gap antara kebijakan berbasis teknologi dengan kesiapan dan kemampuan pengguna (pelaku usaha), yang berujung pada ketidakefektifan sistem.
4. Efektivitas Sosialisasi dan Pendampingan yang terbatas: Kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan DPMPTSP dinilai belum menjangkau seluruh pemangku kepentingan dan belum mampu meningkatkan kesadaran serta kepatuhan secara signifikan. Hal ini memunculkan masalah mengenai strategi, metode, dan intensitas komunikasi kebijakan yang selama ini dilakukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka diperoleh beberapa pertanyaan yang penulis rumuskan dalam rumusan masalah, diantaranya:

1. Bagaimana implementasi komunikasi kebijakan pengawasan dan pembinaan penanaman modal melalui LKPM pada DPMPTSP Kota Bandung ditinjau dari aspek transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi?

2. Bagaimana kondisi sumber daya dalam mendukung implementasi kebijakan pengawasan dan pembinaan penanaman modal melalui LKPM pada DPMPTSP Kota Bandung?
3. Bagaimana disposisi pelaksana dalam implementasi kebijakan pengawasan dan pembinaan penanaman modal melalui LKPM pada DPMPTSP Kota Bandung?
4. Bagaimana struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pengawasan dan pembinaan penanaman modal melalui LKPM pada DPMPTSP Kota Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Merujuk pada Rumusan masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis implementasi komunikasi kebijakan pengawasan dan pembinaan penanaman modal melalui LKPM pada DPMPTSP Kota Bandung ditinjau dari aspek transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi.
2. Menganalisis kondisi sumber daya dalam mendukung implementasi kebijakan pengawasan dan pembinaan penanaman modal melalui LKPM pada DPMPTSP Kota Bandung.
3. Menganalisis disposisi pelaksana dalam implementasi kebijakan pengawasan dan pembinaan penanaman modal melalui LKPM pada DPMPTSP Kota Bandung.
4. Menganalisis struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pengawasan dan pembinaan penanaman modal melalui LKPM pada DPMPTSP Kota Bandung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

E. Kegunaan Penelitian

1. Aspek Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan proses implementasi kebijakan penanaman modal di tingkat daerah. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai implementasi kebijakan pengawasan dan pembinaan penanaman modal melalui LKPM. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan perbandingan (studi empiris) bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji implementasi kebijakan publik, terutama pada aspek koordinasi antar-lembaga, kinerja birokrasi daerah, serta pemanfaatan sistem pelaporan digital dalam pengawasan investasi.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas pemahaman teoretis tentang hubungan antara kebijakan pemerintah dan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi penanaman modal.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Peneliti

1) Penelitian ini dapat menambah wawasan dsn pemahaman peneliti mengenai proses implementasi kebijakan publik, khsusnya dalam bidang pengawasan dan pembinaan modal ditingkat daerah.

2) Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berfokus pada kajian implementasi, pengawasan, dan evaluasi kebijakan penanaman modal daerah.

b. Bagi Instansi Terkait

1) Penelitian dapat membantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung dalam menilai sejauh mana kebijakan pengawasan dan

pembinaan penanaman modal melalui LKPM telah berjalan secara efektif di lapangan.

2) Penelitian ini stansi terkait dapat merumuskan strategi pembinaan yang lebih tepat sasaran dengan memperhatikan kebutuhan dan kendala yang dihadapi pelaku usaha.

c. Bagi Masyarakat

1) Dapat memberikan kesadaran dan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat khususnya pelaku usaha mengenai pentingnya pelaporan kegiatan investasi melalui sistem LKPM sebagai instrumen pengawasan pemerintah.

2) Mendorong terciptanya hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat khususnya para pelaku usaha, melalui mekanisme proses pembinaan dan pendampingan investasi yang lebih terbuka dan partisipatif.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini disusun untuk menjelaskan alur analisis implementasi kebijakan pengawasan dan pembinaan penanaman modal melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan sistem dalam administrasi publik yang terdiri atas empat komponen utama, yaitu *input*, *process*, *output*, dan *feedback*, dengan *environment* (lingkungan) sebagai faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Pertama, *input* (masukan) merupakan kondisi awal yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan. Pada penelitian ini, input meliputi landasan hukum pengawasan dan pembinaan penanaman modal, tujuan kebijakan, serta permasalahan yang ditemukan dalam implementasinya. Permasalahan tersebut mencakup tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM yang belum optimal, keterbatasan sumber daya aparatur dan sarana pendukung, belum meratanya jangkauan

pembinaan, kendala teknis pada sistem OSS-RBA, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Input juga mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, informasi, dan fasilitas pendukung yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan.

Kedua, *process* (proses) merupakan tahapan analisis terhadap pelaksanaan kebijakan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Analisis dilakukan melalui empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dimensi komunikasi digunakan untuk mengkaji penyampaian informasi dan sosialisasi kebijakan kepada pelaku usaha. Dimensi sumber daya digunakan untuk menganalisis kecukupan aparatur, anggaran, sarana dan prasarana, serta dukungan teknologi. Dimensi disposisi digunakan untuk mengkaji komitmen, sikap, dan kesediaan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Sementara itu, dimensi struktur birokrasi digunakan untuk menganalisis prosedur kerja, pembagian tugas dan wewenang, serta koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan penanaman modal.

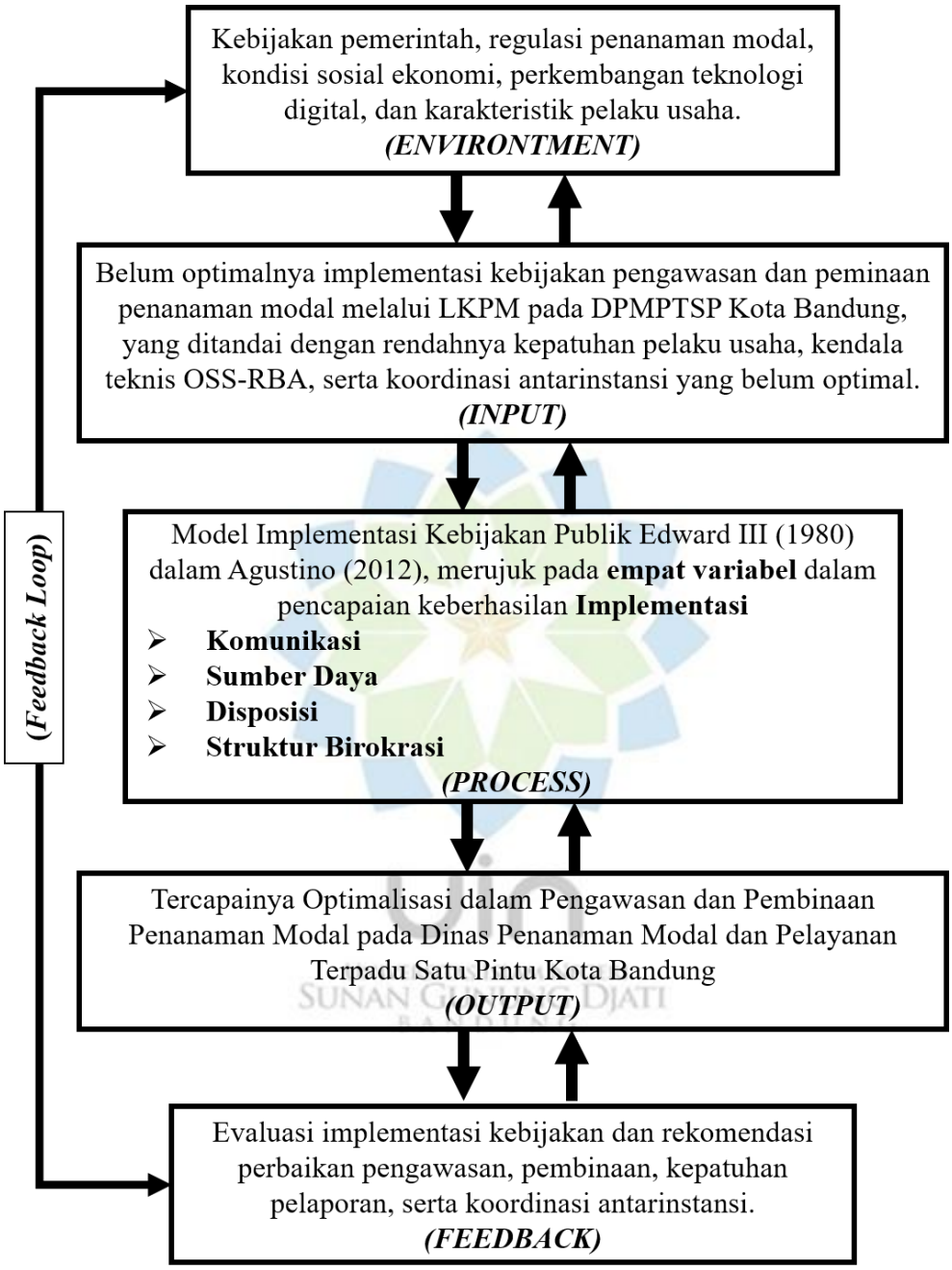
Ketiga, *output* (keluaran) merupakan hasil yang diperoleh dari proses implementasi kebijakan dan analisis penelitian. Output penelitian ini berupa gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pembinaan penanaman modal melalui LKPM pada DPMPTSP Kota Bandung, identifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi, serta analisis terhadap kondisi kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan LKPM. Hasil tersebut digunakan untuk mengetahui aspek implementasi yang telah berjalan dengan baik maupun aspek yang masih memerlukan perbaikan.

Keempat, *feedback* (umpan balik) merupakan informasi yang diperoleh dari hasil pelaksanaan kebijakan dan evaluasi terhadap implementasinya. Dalam penelitian ini, feedback mencakup hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan dan pembinaan, tanggapan serta kendala yang dihadapi pelaku usaha, hasil pemantauan kepatuhan pelaporan LKPM, dan temuan mengenai hambatan koordinasi maupun prosedur kerja. Umpan balik tersebut menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi perbaikan, seperti peningkatan jangkauan sosialisasi, penguatan kapasitas pengawasan,

penyempurnaan prosedur operasional, serta peningkatan koordinasi dan integrasi data antarinstansi. Dengan demikian, hasil evaluasi dapat digunakan sebagai masukan bagi perbaikan implementasi kebijakan secara berkelanjutan.

Adapun *environment* (lingkungan) merupakan faktor eksternal yang memengaruhi hubungan antara input, proses, output, dan feedback. Dalam konteks penelitian ini, lingkungan mencakup kondisi regulasi, karakteristik dan tingkat literasi pelaku usaha, perkembangan teknologi digital dan sistem OSS-RBA, kondisi sosial-ekonomi daerah, serta koordinasi dengan instansi terkait. Faktor-faktor tersebut dapat mendukung maupun menghambat pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pembinaan penanaman modal. Oleh karena itu, implementasi kebijakan perlu dianalisis dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan tempat kebijakan dilaksanakan.

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka berpikir penelitian ini menempatkan kebijakan pengawasan dan pembinaan penanaman modal melalui LKPM sebagai suatu sistem yang saling berkaitan. Input menjadi dasar pelaksanaan kebijakan, proses menggambarkan implementasi berdasarkan empat dimensi Edward III, output menunjukkan hasil implementasi dan temuan penelitian, sedangkan feedback menyediakan masukan untuk perbaikan berkelanjutan. Seluruh komponen tersebut dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Melalui kerangka ini, penelitian diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan serta merumuskan rekomendasi bagi peningkatan efektivitas pengawasan dan pembinaan penanaman modal pada DPMPTSP Kota Bandung.



Gambar 1.2
Kerangka Berpikir
Sumber : Diolah Peneliti, 2026